

# Potret Perilaku Pemilih Pemula dan Dinamika Kesiapannya dalam Mengikuti Pemilu: Studi Fenomenologi pada Siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat di Kota Serang

Yeby Ma'asan Mayrudin<sup>1</sup>, Siti Dinda Rahayu<sup>2</sup>, Dita Amalia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [yeby@untirta.ac.id](mailto:yeby@untirta.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [sitidindarahayu@gmail.com](mailto:sitidindarahayu@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [ditaa.amaliaa12@gmail.com](mailto:ditaa.amaliaa12@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Oct, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

### Kata Kunci:

Fenomenologi; Kesiapan;  
Pemilih Pemula; SMA sederajat;  
Usia Pemilih

### Keywords:

*Beginner Voters; Higher School or  
equivalent; Phenomenological;  
Readiness; Voters Age*

## ABSTRAK

Fokus artikel ini ialah memotret perilaku pemilih pemula yaitu para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan menyelidik kesiapan mereka dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Urgensi kajian ini menyoal perdebatan batas usia pemilih di Indonesia, serta interseksi antara literasi politik, kesiapan, dan aksesibilitas politik yang dialektik, yakni satu sisi mereka sudah diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu, Namun aturan sekolah menegaskan larangan berpolitik praktis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Creswell, melalui wawancara mendalam kepada para siswa SMA sederajat di Kota Serang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas informan menegaskan bahwa mereka sebagai pemilih pemula menilai dengan usia mereka yang masih 17 tahun menganggap belum matang untuk memilih karena keterbatasan pemahaman teknis dan substantif, serta lebih merasa siap pada usia 18–20 tahun. Rekonstruksi dan proyeksi atas temuan ini adalah perlunya peninjauan kembali kebijakan usia pemilih dari 17 tahun menjadi 18 tahun atau sedang berkuliah. Hal ini didasarkan pada kesiapan partisipasi tidak hanya sekedar ditentukan oleh umur, melainkan oleh ekosistem pendidikan politik yang menyertainya.

## ABSTRACT

*This article focuses on capturing the behavior of first-time voters, namely high school students (SMA) and their equivalent, and examining their readiness to exercise their right to vote in the 2024 General Election and Regional Elections. The urgency of this study questions the debate over the voting age limit in Indonesia, as well as the intersection of political literacy, readiness, and political accessibility, which is dialectical. On the one hand, they are already allowed to participate in elections, but school regulations emphasize the prohibition of practical politics. This research uses a qualitative method with the Creswell phenomenological approach, through in-depth interviews with high school students in Serang City, Banten. The results show that the majority of informants confirmed that they, as first-time voters, consider their age of 17 to be immature to vote due to limited technical and substantive understanding, and feel more ready at the age of 18–20. The reconstruction and projection of these findings is the need to review the voting age policy from 17 to 18 or currently attending college. This is based on the belief that readiness for participation is not solely determined by age, but by the accompanying political education ecosystem.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Yeby Ma'asan Mayrudin

Institution: University of Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [yeby@untirta.ac.id](mailto:yeby@untirta.ac.id)

---

**1. PENDAHULUAN**

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu sering kali dianggap sebagai bentuk kebebasan dalam demokrasi partisipatif. Namun rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu membuat banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami proses politik secara mapan (Faqih dkk., 2022; Indrawan & Yuliandri, 2023; Sa'ban dkk., 2022). Antusiasme tinggi dalam mengikuti pemilu pun tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas rasionalitas pemilih (Pakpahan dkk., 2024a; Putro Herwanto & Febrianti, 2025).

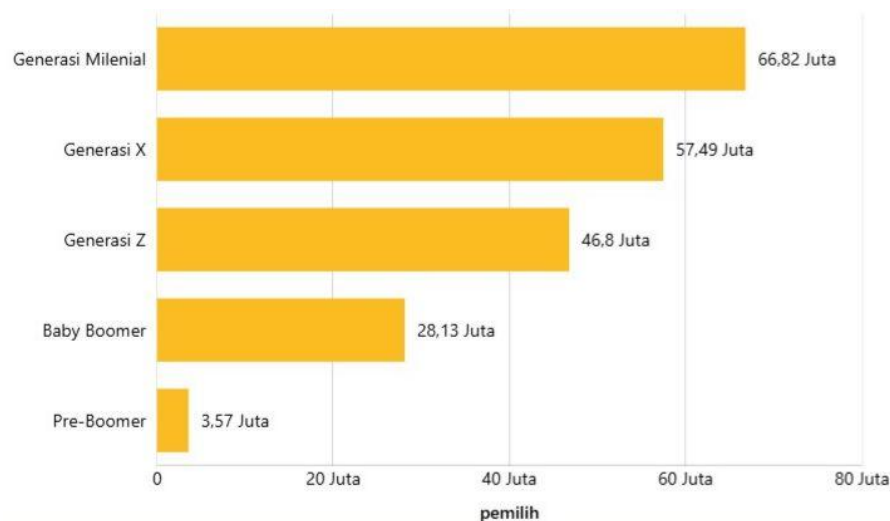
Sementara itu, sejumlah negara seperti Austria dan Jerman memberi hak memilih di usia 16 tahun. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan disertai dengan integrasi kuatnya pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah serta dukungan lembaga pendidikan politik seperti *Bundeszentrale für politische Bildung* (BPB) di Jerman. Negara-negara tersebut membuktikan bahwa pemilih berusia muda mungkin saja mampu mendorong partisipasi politik secara signifikan. Dengan catatan bila diiringi oleh sistem pendidikan politik yang memadai (Eichhorn & Huebner, 2022). Meskipun pemilih pemula cenderung lebih netral terhadap isu-isu kebijakan dan kurang yakin dalam menentukan partai pilihan. Bahkan dengan tingkat minat politik yang lebih rendah, pemilih pemula tetap mampu membuat keputusan yang layak melalui proses berpikir cepat berbasis pengalaman sosial atau *heuristik* (Hooghe & Stiers, 2017; Wagner et al., 2012).

Dalam konteks pelajar SMA di Indonesia, muncul keraguan serius terkait kapasitas mereka dalam menentukan pilihan politik secara sadar dan mandiri. Minimnya literasi politik, terbatasnya ruang pendidikan politik formal di sekolah, serta kondisi psikologis remaja yang masih dalam tahap perkembangan menjadikan pemilih usia SMA sebagai kelompok yang rentan atas info hoaks, manipulasi fakta dan lain sebagainya (Faqih dkk., 2022; Indrawan & Yuliandri, 2023; Sa'ban dkk., 2022; Pakpahan dkk., 2024; Putro Herwanto & Febrianti, 2025). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah memperbolehkan kegiatan politik di lingkungan pendidikan dengan ketentuan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak sekolah, efektivitas kebijakan ini masih belum menyentuh aspek pendidikan politik yang substantif dan kritis.

Berdasarkan penelitian di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, menunjukkan bahwa pengetahuan politik pemilih pemula masih tergolong rendah. Siswa kelas 12 umumnya belum memahami sistem dan proses politik, serta hanya memaknai partisipasi sebatas pada tindakan mencoblos. Informasi politik yang mereka terima sebagian besar bersumber dari media sosial tanpa verifikasi kritis, sehingga rawan terpapar isu-isu hoaks (Lara Angraini dkk., 2025).

Isu partisipasi politik pemilih pemula menjadi penting sebab kelompok ini kerap berada dalam fase pencarian jati diri yang membuat mereka relatif labil dalam menentukan pilihan politik. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) mendorong mereka untuk mengikuti arus tanpa pertimbangan rasionalitas yang matang. Kondisi ini menjadikan pemilih pemula mudah dimobilisasi melalui narasi emosional, tren media sosial, atau tekanan lingkungan sekitar maupun idola-*influencer* yang mereka kagumi. Dalam konteks politik elektoral, frekuensi ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjadikan pemilih pemula sebagai alat penggerak massa, bukan subjek politik yang berdaya.

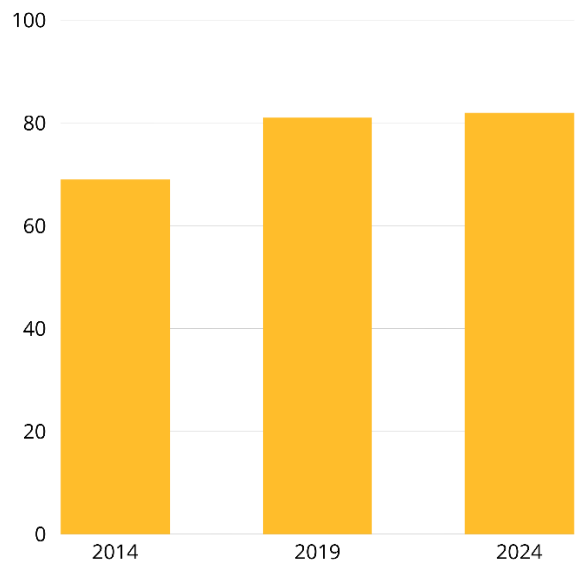
Dominasi generasi muda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga mencerminkan betapa pentingnya isu literasi politik. Data dari Katadata (2024) menunjukkan komposisi pemilih berdasarkan generasi sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Jumlah DPT Berdasarkan Generasi  
Sumber: Data Diolah dari Katadata (2024)

Dari tabel di atas tampak bahwa Generasi Z mencapai 46,8 juta pemilih, sedangkan Generasi Milenial mencapai 66,82 juta. Dengan total lebih dari 113 juta, dari 204,80 juta pemilih. Kelompok muda ini mendominasi pemilih secara keseluruhan. Kondisi ini mempertegas bahwa kualitas partisipasi politik generasi muda, termasuk pemilih pemula dari kalangan pelajar SMA, akan sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Hal ini dapat diperkuat dengan melihat tingkat partisipasi pemilih yang memberikan gambaran nyata tentang keterlibatan mereka dalam pemilu. Lihat gambar 2 di bawah ini yang menyajikan data partisipasi pemilih selama tiga periode terakhir.



Gambar 2. Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilu  
Sumber: Diolah Tim Penulis (2025) dari Kompas dan KPU

Berdasarkan tabel di atas, tingkat partisipasi menunjukkan tren peningkatan. Pada Pemilu 2014, angka partisipasi tercatat sebesar 69,58 %, kemudian meningkat tajam menjadi 81,97 % pada Pemilu 2019, dan mencapai sekitar 82,39 % pada Pemilu 2024. Keberlanjutan tren kenaikan ini bersamaan dengan dominasi jumlah Generasi Z dan Milenial menandakan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi mayoritas dalam daftar pemilih, tetapi juga berperan penting dalam menjamin

legitimasi demokrasi melalui partisipasi substantif. Namun demikian, sebagian besar angka partisipasi ini belum menjamin bahwa pemilih pemula secara otomatis memiliki kualitas rasionalitas dan pemahaman politik mumpuni, terutama mengecek latar belakang kandidat dan memahami isu atau kampanye politik yang ditawarkannya.

Temuan ini menjadi refleksi bahwa kualitas pilihan politik tidak semata-mata ditentukan oleh usia, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara minat politik, pendidikan, dan akses terhadap informasi politik yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pemilih pemula usia pelajar memaknai hak memilih mereka dan sejauh mana kesiapan politik mereka terbentuk dalam konteks pemilu lokal di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan usia pemilih pemula sebagai faktor utama dalam memahami perilaku politik pada Pemilu 2024. Sementara aspek pendidikan politik dianalisis sebagai faktor pendukung yang memperkuat atau menambahkan pengaruh usia tersebut. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada pendidikan politik, tingkat literasi demokrasi, atau faktor eksternal lain (seperti media sosial dan keluarga) (Faqih dkk., 2022; Indrawan & Yuliandri, 2023; Sa'ban dkk., 2022) tanpa memberikan perhatian khusus pada usia sebagai titik krusial pembentuk perilaku memilih generasi baru. Dengan pendekatan ini, kami berupaya menghadirkan perspektif bahwa usia muda bukan sekadar kategori demografi, tetapi juga fase transisi sosial-politik yang unik.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik dengan dimensi tertentu usia dengan proses konstruksi makna politik, khususnya dalam kerangka penelitian fenomenologi. Hal ini membuka ruang baru untuk melihat usia tidak hanya sebagai variabel statistik, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang membentuk pola partisipasi dan preferensi politik. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan pendidikan politik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan usia pemilih pemula. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil untuk merancang program pendidikan politik yang spesifik untuk usia remaja, sehingga proses regenerasi demokrasi berjalan lebih efektif dan partisipatif.

Berdasarkan pengamatan literatur, partisipasi politik pemilih pemula sering dipengaruhi oleh faktor pendidikan politik (Eichhorn & Huebner, 2022). Namun penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan aspek pendidikan politik sebagai instrumen utama. Sementara faktor usia pemilih justru kurang diperhatikan secara proporsional. Padahal, usia merupakan penanda penting yang menentukan pengalaman politik, tingkat kedewasaan, dan pola pengambilan keputusan dalam proses pemilu. Tim penulis berargumen bahwa pemilih pemula memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pendidikan politik, karena pada fase transisi menuju kedewasaan, pemilih pemula siswa SMA sederajat cenderung membentuk identitas politiknya berdasarkan usia dan pengalaman pertama mereka dalam pemilu. Pendidikan politik berperan sebagai faktor pendukung, namun tidak sepenuhnya menentukan, sehingga penelitian ini menempatkan usia sebagai unit analisa utama yang dapat memengaruhi partisipasi politiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana usia memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu, serta sejauh mana pendidikan politik berperan dalam membentuk pemahaman dan perilaku memilih mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai perilaku politik pemilih pemula di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas demokrasi yang substansial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai usia pemilih dan pendidikan politik telah menjadi perhatian banyak kajian, baik di tingkat global maupun nasional. Dalam konteks demokrasi, penentuan usia pemilih minimal sering kali dipandang sebagai kompromi antara kedewasaan biologi dan kedewasaan politik. Beberapa penelitian internasional menyoroti bahwa penetapan usia 17 tahun atau lebih rendah pada kasus tertentu tidak selalu menjamin keterlibatan politik yang berkualitas, karena

faktor psikososial dan kapasitas kognitif pemilih muda masih beragam (Franklin, 2004). Sebaliknya, penelitian lain berpendapat bahwa menurunkan atau mempertahankan usia pemilih justru penting sebagai upaya regenerasi demokrasi, karena regenerasi demokrasi dapat membentuk kebiasaan memilih di masa depan (Zeglovits & Aichholzer, 2014).

### 2.1 Perilaku Memilih Pemilih Pemula

Di Indonesia, literatur tentang pemilih pemula mulai berkembang, meski relatif terbatas (Tamma, 2021). Hal bahwa pendidikan di sekolah berperan penting dalam pembentukan preferensi politik awal siswa yang tidak semata-mata mengikuti keluarga, tetapi dipengaruhi oleh materi Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat kritis dan reflektif. (Eriza dkk., 2025) melakukan survei kuantitatif terhadap pemilih pemula di Lubuk Sikaping menemukan bahwa hanya 5,1% partisipasi yang dapat dijelaskan oleh pendidikan politik dan sekitar 94,9% dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, media, hubungan sosial, pengalaman pribadi, dan ekonomi.

Selanjutnya penelitian (Putri & Sari, 2020) memotret perilaku pemilih pemula usia 17–19 tahun di Sidoarjo dan menemukan sekitar 55% pemilih pemula memilih berdasarkan pendidikan, 20% karena kinerja, dan 24% karena kesamaan identitas (agama), dan hanya 1% yang memilih secara acak. Temuan ini menegaskan bahwa masih rendahnya rasionalitas kritis pemilih pemula.

Russel J. Dalton (2014) dalam *Citizen Politics* menyatakan bahwa salah satu bentuk utama perilaku politik adalah *Voting Behaviour*. *Voting* dipahami sebagai wujud partisipasi warga dalam politik, yang tidak hanya dilihat dari memilih atau tidak memilih, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Tindakan memilih mencerminkan sikap politik warga negara dalam menggunakan hak suara, sekaligus merefleksikan pola transformasi politik di masyarakat.

Teori *voting behaviour* relevan untuk menganalisis perilaku pemilih pemula karena usia menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi cara seseorang membuat keputusan politik. Pemilih pemula umumnya masih dalam tahap mencari identitas politik, sehingga pilihan mereka cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, media, serta figur kandidat yang dianggap dekat dengan dunia anak muda. Misalnya, pendekatan *model sosiologi* dalam teori perilaku memilih dapat menjelaskan bahwa pemilih berusia muda sering kali lebih dipengaruhi oleh kelompok teman atau komunitas tempat mereka bergaul. Selain itu, *model psikologis* dapat digunakan untuk melihat bagaimana emosi pemilih terhadap partai muda atau kandidat tertentu terbentuk meskipun pengalaman politik mereka masih minim. Dengan demikian, teori perilaku memilih membantu memahami bagaimana faktor usia, khususnya pada pemilih pemula, membentuk perilaku politik mereka dalam proses pemilu.

Penggunaan teori perilaku memilih akan mencermati bagaimana faktor usia (sebagai bagian dari latar belakang sosial pemilih) memengaruhi preferensi politik pemilih pemula. Kerangka ini membantu menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana usia menjadi instrumen penting dalam menentukan perilaku pemilih pemula dalam memilih pada ranah pemilu legislatif, presiden maupun kepala daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental (Creswell dkk., 2007). Pendekatan ini berupaya mengungkap makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh sembilan siswa SMA sederajat sebagai pemilih pemula yang berdomisili dan bersekolah di lingkup Kota Serang Banten. Khususnya mendalami keterlibatan mereka serta persepsi mengenai usia yang tepat dalam menggunakan hak pilih. Penentuan informan berlandas pada teknik *purposeful sampling* dengan pertimbangan tertentu seperti karakteristik sekolah (SMA,

SMK negeri atau swasta dan lain sebagainya), proporsi jenis kelamin, persetujuan atau kesediaan menjadi informan dan terdaftar sebagai pemilih. Fokus penelitian ini adalah menggali bagaimana pemilih pemula, terutama yang masih berada pada jenjang SMA sederajat, memahami proses demokrasi dan sejauh mana pendidikan politik memengaruhi kesiapan mereka dalam menentukan pilihan.

Dalam penelitian ini, kami memanfaatkan unit *coding* analisis ala Creswell dari mulai *epoche*, *significant statement*, *meaning unit*, *textural description* dan *structural description*. Pada tahap *epoche*, tim peneliti secara sadar menahan atau membatasi asumsi dan bias pribadi mengenai pengetahuan usia pemilihan serta efektivitas pendidikan politik. Hal ini bertujuan agar sudut pandang para informan dapat muncul lebih otentik. Selanjutnya dilakukan reduksi fenomenologis, yaitu menyaring pengalaman-pengalaman yang diceritakan pemilih pemula untuk menemukan aspek mendasar terkait keterbatasan akses pendidikan politik, pengaruh lingkungan sosial, serta tantangan psikologis yang mereka hadapi dalam proses memilih. Kemudian, penelusuran atas *significant statement* dan *meaning unit* yang telah disampaikan oleh para informan kunci. Tahap selanjutnya, kami mengupayakan pembedahan atas *textural description* dan *structural description* serta transendensi, yakni berupaya mengungkap makna universal mengenai keterkaitan usia, kesiapan politik, dan kualitas demokrasi partisipasi, sehingga dapat memberikan dasar empiris bagi kebijakan evaluasi terkait penentuan usia minimal pemilih di Indonesia, khususnya di Kota Serang, Provinsi Banten.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sub topik ini, kami menjelaskan *hasil penelitian* yang memfokuskan tentang pengalaman pertama para informan dalam pemilu, pemaknaan mereka atas kesiapan dalam kontestasi elektoral baik pada pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada. Selanjutnya pada *pembahasan*, kami coba merekonstruksi persepsi para siswa SMA sederajat tentang perlunya perubahan batas usia pemilih pada arena politik elektoral di Indonesia dengan meningkatkan batas usia 17 tahun menjadi 18 tahun atau sedang masa pendidikan di level universitas.

##### 4.1 Hasil Penelitian: Pengalaman dan Kesiapan Pemilih Siswa dalam Pemilu

Bagian ini, kami menyajikan potret hasil penelitian tentang pengalaman pertama ikut pemilu dan kesiapan para pemilih siswa SMA sederajat dalam pemilu. Pemilih pemula sebagai kelompok usia sangat muda memiliki pengalaman pertama yang unik dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan wawancara dengan para informan, kami memperoleh informasi bahwa proses pemilu sering dipahami sebagai sesuatu yang membingungkan bagi mereka. Sebagaimana diungkap oleh Maya bahwa “...bingung tidak tahu mau pilih yang mana, cara nyoblosnya gimana?” (Wawancara Maya, 27 Juli 2025). Selaras dengan itu, penjelasan Intan: “...pengalamannya pertama kali ya, yang pertama masih bingung sih ya. Soalnya kayak baru masuk ke dunia politik” (Wawancara Intan, 3 Agustus 2025). Hal senada juga disampaikan oleh Dwi yang menegaskan bahwa “...awalnya sih bingung ya, kayak gimana nggak tau cara nyoblosnya gitu kan Kayak takutnya salah juga kan bagian nyoblos yang mana begitu. Terus mah, kayak nanya-nanya nih kan ke orang” (Wawancara Dwi, 3 Agustus 2025).

Hal di atas menunjukkan bahwa pengalaman pertama kali ikut pemilu, sering kali diwarnai dengan keterbatasan pengetahuan politik. Pengalaman kesusahan yang dialami Maya ditunjukkan sejak awal berada di bilik suara. Ia tidak tahu harus memilih siapa dan bagaimana cara mencoblos. Intan juga merasakan hal serupa. Dirinya menggambarkan pengalaman pertama masuk ke dunia politik sebagai sesuatu yang membingungkan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, Dwi mengalami kesulitan yang lebih teknis, seperti takut salah dalam memberi tanda di surat suara, sehingga harus bertanya kepada orang lain di sekitarnya. Bentuk kebingungan ini bisa dilihat dalam beberapa variasi. *Pertama*, kebingungan teknis, yaitu ketidaktahuan tentang tata cara pencoblosan dan

mekanisme pemilu. *Kedua*, kebingungan dalam memilih, yakni sulitnya menentukan kandidat karena minimnya pengetahuan tentang profil calon maupun program yang ditawarkan. *Ketiga*, kebingungan psikologis, berupa rasa takut salah dan kurang percaya diri ketika harus mengambil keputusan politik untuk pertama kalinya.

Dengan demikian, fakta tersebut menegaskan bahwa tidak sedikit para pemilih pemula khususnya siswa SMA sederajat cenderung belum memiliki literasi politik atau pendidikan politik yang memadai dalam partisipasi politik kepemiluan. Kemapanan literasi (pendidikan) politik bagi seseorang, menunjukkan kedewasaannya dalam proses politik dan manifestasi demokrasi yang substansial.

Fenomena ini selaras dengan studi Ilmar dkk., (2024) yang mempertegas bahwa pendidikan politik yang kerap kali normatif membuat sebagian pemilih pemula memaknai bahwa pemilu hanya sebatas kewajiban formal warga negara, bukan arena refleksi politik kritis (Ilmar dkk., 2025). Di Indonesia, hal tersebut konsisten didukung dengan studi yang dilakukan oleh Eriza & Adnan (2025) yang memaparkan bahwa faktor pendidikan politik hanya memberikan intervensi minimum berkisar 5,1% terhadap partisipasi pemilih pemula. Lain halnya dengan pihak mayoritas pemilih pemula yang diintervensi oleh faktor eksternal seperti keluarga, media sosial, ataupun lingkungan sosial (Eriza & Adnan, 2025). Sementara itu, di negara-negara Eropa upaya menguatkan literasi politik pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mampu menjadi pilar pendukung dalam meningkatkan keterampilan politik remaja sampai usia 20 tahun (Lundberg & Abdelzadeh, 2025).

Selanjutnya, kami menyajikan tabel 2 yaitu matriks hasil wawancara yang memfokuskan temuan tentang bagaimana kesiapan memilih pada pemilu legislatif, presiden, maupun pilkada bagi pemilih siswa SMA sederajat di Kota Serang, Banten:

Tabel 1. Kesiapan Memilih pada Pemilu bagi Pemilih Siswa

No	Significant Statement	Meaning Unit	Kata Kunci
1.	"kemarin di 17 masih <b>belum</b> ngerasa <b>siap</b> ." (Maya 2025)	Merasa belum cukup matang saat usia 17 tahun untuk memilih	Belum siap
2.	"Iya. Ngerasa <b>siapnya</b> di umur sekarang <b>18 tahun</b> ." (Rehan 2025)	Keseimbangan baru dirasakan setelah melewati usia 17 tahun	Kesiapan di usia 18 tahun
3.	"[umur] 17 tuh masih <b>belum siap</b> . Bingung Iya masih bingung." (Ahmad 2025)	Usia 17 tahun dianggap masih belum siap untuk memilih	a. bingung b. belum siap
4.	"20 Tahun kemarin di usia 17 tuh <b>belum siap</b> ." (Intan 2025)	Refleksi pengalaman sebelumnya bahwa usia 17 belum ideal	a. refleksi b. belum ideal
5.	"20 tahun ke atas sih. Karena kalau di usia 17 kayak sekarang ya masih sekolah tuh biasanya <b>masih labil</b> . Belum tahu apa-apa, ya masih ikut-ikutan lah. Jadi kalau bisa 20 tahun ke atas yang udah jadi mahasiswa." (Lina 2025)	Pemilih usia 17 tahun dianggap masih labil dan belum memiliki pengetahuan yang cukup	a. labil b. belum tahu apa-apa
6.	"menurut saya pribadi ya Hmm Kalau menurut saya tuh lebih matang sih kalau udah lulus sekolah ya Karena kayak, apa ya, kalau <b>sekolah</b> kan kayak <b>masih bingung</b> juga terus mau kayak gak ada gambaran Terus kayak harus fokus lah sekolah gitu" (Dwi 2025)	Kesediaan lebih dianggap baik setelah menyelesaikan pendidikan menengah	Tidak fokus karena sekolah

No	Significant Statement	Meaning Unit	Kata Kunci
7.	"kalau ditanya umur, aku rasa 17 ngga [siap]... 18 tahun itu <b>sudah harusnya mungkin 18 atau 19 tahun</b> ya tapi kemungkinan antara 18 atau 19 tahun gitu." (Regi 2025)	Kesiapan dinilai lebih tepat pada usia 18–19 tahun karena aspek kemampuan	Usia 18–19 lebih tepat
8.	"20 Tahun kalo sekarang masih suka <b>labil</b> ." (Via 2025)	Usia di bawah 20 tahun dianggap masih belum stabil secara emosi	Labil
9.	"19 Karena kalau di 17 itu masih ngerasa <b>belum siap</b> gitu ya." (Defi 2025)	Usia 19 dianggap baru muncul rasa siap untuk memilih	Belum siap

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, terlihat bahwa mayoritas informan merasakan usia 17 tahun belum cukup matang untuk seseorang menentukan pilihan di bilik suara. Bila kita mencermati hal tersebut, kesiapan pemilih pemula mulai terbentuk dan dikehendaki pada usia 18–20 tahun. Ketika mereka mempunyai sisi psikologis yang lebih stabil serta mempunyai pemahaman yang mencukupi pada dunia perpolitikan. Hal ini jelas memperlihatkan adanya keraguan terkait penetapan batas usia pemilih pemula 17 tahun. Hal sejalan juga diungkapkan dalam penelitian Yahya, Warsoyo, & Ghani (2024) yang menjelaskan bahwa Gen Z di Jakarta cenderung rasional dalam memilih, ketika berada pada fase mahasiswa awal, bukan di fase SMA (Kholilah Yahya et al., 2024). Seperti paparan Lina yang menegaskan saran kesiapan pemilih itu bukan di masa SMA melainkan di masa menjadi mahasiswa. Bahkan beberapa informan mengungkapkan kesiapan mereka menjadi pemilih itu seharusnya di usia 18, 19 bahkan di usia 20 tahun bukan di masa SMA.

Pada fase pembelajaran di tingkat SMA sederajat, para siswa menghadapi kontradiksi nyata dalam partisipasi politik. Hal ini disebabkan karena adanya "aturan" di sekolah yang sesungguhnya melarang aktivitas politik dan keterlibatan para siswa dalam politik praktis. Namun, aturan ini pun nyatanya dilanggar oleh oknum guru yang mencoba memengaruhi para siswa agar ikut memilih salah satu kandidat yang didukungnya. Lina seorang siswa menceritakan bahwa "Ada dari pihak sekolah memilih salah satu pasangan calon pilpres." Siswa merupakan kelompok rentan atas manipulasi informasi karena pola pikir dan kemampuan literasi politik yang belum memadai. Alhasil para siswa mudah untuk dimobilisasi dan diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan jangka pendeknya. Maka hal tersebut menimbulkan potensi bias persepsi yang diterima oleh kalangan pemilih siswa di usia 17 tahun. Potensi bias persepsi yang dialami oleh pemilih siswa juga telah diungkapkan dalam studi yang dilakukan oleh Eriza & Adnan (2025) yang mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti sekolah memberikan intervensi pada partisipasi pemilih pemula (Eriza & Adnan, 2025). Secara komparatif, di Jerman lembaga pendidikan politik justru menjadi pihak yang aktif mengarahkan pendidikan politik netral. Maka hasilnya sekolah menjadi wadah penguatan literasi politik (Eichhorn & Huebner, 2022) yang konstruktif, tidak hanya sebagai ruang produksi cetak angka sebanyak-banyaknya kepesertaan dan partisipasi memilih.

Kemudian, kami sebagai fenomenolog berusaha untuk menyajikan penggambaran atau deskripsi *common meaning* atas konsep atau fenomena pemilih pemula usia 17 tahun yang merupakan pemilih berstatus siswa di SMA sederajat Kota Serang Banten. Deskripsi ini kami dapatkan dari pertanyaan "Bagi kamu di usia 17 (atau masa SMA) ini kamu sudah merasa waktu yang tepat untuk berpolitik memberikan suara dalam pemilu atau tidak?" Berikut di bawah ini tabel 2 matriks konsep usia 17 tahun sebagai pemilih pemula yang dihasilkan dari wawancara dengan para informan kunci:



Tabel 2. Matriks Konsep Usia 17 Tahun Sebagai Pemilih Pemula

No	Significant Statement	Meaning Unit	Kata Kunci
1.	<i>"Belum tepat karena masih fokus sekolah seharusnya (maya 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
2.	<i>"Nggak tepat karena tadi awal jawabannya ngerasa siap tuh di umur 18 tahun" (Rehan 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
3.	<i>"Nggak sih karena di umur 17 tuh belum cukup lah, belum ini lah masih bingung gitu." (Ahmad 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
4.	<i>"Nggak. Karena anak SMA itu kan fokusnya harusnya belajar ya, bukan terjun ke dunia politik. Jadi ngerasa belum siap aja. Belum waktunya juga." (Intan 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
5.	<i>"Nggak. Karena belum tau apa-apa ya jadi ngerasa nggak tepat." (Lina 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
6.	<i>"Seperti yang tadi saya bilang Kayaknya belum sih ya Kalau misalnya tuh kayak udah lulus sekolah 19, 18, 20 tahunan gitu ." (Dwi 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
7.	<i>"Sebetulnya di masa SMA, ini yang betul-betul menjadi awal pembelajaran dalam memahami politik yang ada di Indonesia menurut saya karena di masa SMA itu, dia bisa menentukan arah selanjutnya gitu ya jika dia ingin masuk ke perkuliahan, dia bisa udah ngerti gitu fundamental politik di Indonesia itu seperti apa mungkin prosedur dalam memilih pemimpin itu seperti apa, kayak apa ya mungkin kalau di usia 17 atau masa SMA itu saya rasa sudah tepat tapi untuk belajar gitu kalau untuk memberikan suara itu harus melakukan pendalaman yang lebih gitu ." (Regi 2025)</i>	Usia 17 Tahun sudah tepat untuk mempelajari tentang politik, tetapi tidak setuju jika usia 17 bisa memberikan suara atau menjadi pemilih pemula	a. Tidak setuju di usia 17 memberikan hak pilih b. Setuju di usia 17 hanya mempelajari politik
8.	<i>"Belum sih. Karena masih labil" (Via 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju
9.	<i>"Belum karena gatau apa apa." (Defi 2025)</i>	Tidak setuju dengan konsep usia pemilih pemula 17 Tahun	Tidak setuju

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara (2025)

Hasil wawancara dengan informan kunci menilai bahwa usia 17 tahun *belum tepat* untuk diikutsertakan sebagai pemilih pada pemilu. Mereka berargumentasi bahwa siswa SMA cenderung labil, minim terhadap pengetahuan politik, dan lebih tepat untuk fokus pada pendidikan formal saja. Hanya Regi yang memandang bahwa usia 17 tahun tepat dijadikan fase untuk belajar perpolitikan, akan tetapi Regi menilai bahwa belum ideal jika di usia 17 tahun remaja memberikan suaranya. Studi yang dilakukan oleh Yahya et al (2024) juga menjelaskan bahwa Gen Z yang masih duduk dibangku SMA rentan terpengaruh oleh faktor emosional dan identitas, sementara di sisi lain mahasiswa cenderung menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan mereka (Kholilah Yahya et al., 2024).

#### 4.2 Pembahasan: Rekonstruksi Persepsi Siswa SMA tentang Perubahan Batas Usia Pemilih

Pada sub bagian ini, kami mengupayakan rekonstruksi atas proyeksi atau harapan para siswa SMA sederajat mengenai keikutsertaannya pada arena pemilu sebagai pemilih. Kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut: *"Apa harapan kamu kepada pemerintah tentang*

usia 17 tahun atau ketika masih SMA sederajat yang dituntut untuk mengikuti ajang pemilu (Pilpres/Pileg/Pilkada) dan setuju atau tidak batas usia pemilih dinaikkan?" Berlandas pada kekhasan riset *phenomenological approach*, kami memberikan kenyamanan kepada para informan dalam mengungkapkan pengalaman dan pemaknaan objektifnya atas konteks poin pertanyaan tersebut. Kemudian hasil jawaban para informan kami sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Persepsi Informan tentang Perubahan Batas Usia Pemilih

No	Significant Statement	Meaning Unit	Kata Kunci
1.	"Setuju, Karena lebih tau kali ya Caranya kalau udah 18-19 ke atas Udah mateng berarti ya Iya udah mateng." (Maya 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
2.	"Setuju. Karena tadi di umur 17, ngerasa belum siap." (Rehan 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
3.	"Setuju Setuju karena kalau di 17 belum ngerasa siap." (Ahmad 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
4.	"Setuju. Karena itu kan kayak udah terjun ya ke dunia politik, apalagi kita mahasiswa, pastinya udah ngerti. Jadi setuju 18 tahun" (Intan 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
5.	"Setuju, Ya karena anak SMA kan fokusnya belajar ya, bukan memilih. Jadi lebih baik di atas 18. Kalau bisa di atas 18 gitu ya" (Lina 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
6.	"Setuju sih Bisa lebih matang gitu kan." (Dwi 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
7.	"setuju kalau ya tanda kutip nih setuju dinaikin jadi 18 kalau di masa SMA itu betul-betul belajar dalam dia berpolitik bukan berpolitik ya istilahnya memahami prosedur dari pilih kandang memahami kayak siklus atau dinamika dari politik Indonesia memahami sistem demokrasi Indonesia gitu kan memahami hukum-hukum tertentu yang mendukung si apa berjalannya pemilu misalkan itu harus belajar dulu itu kalau misalnya dinaikin jadi 18 tapi rata-rata kosong ya percuma gitu buat aku yang pentingnya fundamentalnya dulu yang dipelajari di usia mungkin SMA itu bisa lah 16 17 kalau langsung bukan langsung ya tapi ngicil belajar oh ini kayak gini-gini oh ini bisa gitu nah ketika dia udah naik ke 18 ketika dia udah punya persiapan yang emang tidak setengah-setengah ataupun kosong itu setuju." (Regi 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
8.	"Setuju, Karena pemikirannya udah matang. Terus dia nggak gampang kena sogokan juga gitu kan." (Via 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju
9.	"Setuju, Nah, dia juga udah tahu visi-visi. Terus ya udah bener-bener matang buat emang dia memilih. Kalau 17 belum." (Defi 2025)	Setuju perubahan batas minimum usia pemilih	Setuju

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara (2025)

Kesembilan informan memberikan jawaban bahwa mereka menyetujui usia minimum untuk pemilih di Indonesia seyogyanya di atas usia 17 tahun. Hal ini berlandaskan pada imaji mereka yang mengungkapkan pemilih usia 18 tahun dipandang lebih matang, lebih siap dalam aspek psikologis, tidak mudah terintervensi oleh pihak eksternal, dan telah mempunyai gambaran tentang politik. Ini memperjelas bahwa informan sebagai

pihak pemilih pemula merasakan belum siap memberikan suaranya ketika berusia 17 tahun atau masih bersekolah di tingkat SMA sederajat. Kematangan usia pemilih, berdasar pada *significant statement* para informan seperti Maya, Dwi, dan Via menjadi kata kunci penting bagi seseorang memiliki hak politik memilih pada pemilu. Mereka menegaskan usia 17 tahun belum memiliki kesiapan untuk menerima hak memilih. Hal ini dikarenakan anggapan mereka yang masih belum memiliki kematangan untuk menggunakan hak politik elektoralnya.

Paparan menarik yang disampaikan oleh Intan perlu kita cermati lebih eksploratif lagi. Intan menegaskan dirinya yang berusia 17 tahun belum siap mengikuti pemilu. Selanjutnya ia menekankan kesiapan menjadi pemilih yakni dirinya sudah layak diberi hak memilih bila sedang masa pembelajaran di level universitas. Hal ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Eriza & Adnan (2025) yang menegaskan bahwa kesiapan politik untuk pemilih pemula cenderung dikendalikan oleh faktor eksternal dan pengalaman sosial, sehingga wajar apabila pemilih pemula di usia 17 tahun merasa belum siap (Eriza & Adnan, 2025). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang digagas oleh Ilmar *et al* (2024) yang memperjelas bahwa yang lebih krusial dalam membingkai pemilih pemula adalah bentuk pendidikan politik yang relevan, sehingga di usia 17 tahun dapat dijadikan pijakan untuk pemilih pemula belajar perpolitikan, walaupun idealnya hak pilih dapat digunakan di usia 18 tahun (Ilmar dkk., 2025).

Fenomena-fenomena yang dialami oleh informan bukan hanya memperlihatkan minimnya kesiapan diri di usia 17 sebagai pemilih pemula. Namun juga mendeskripsikan lemahnya potret institusionalisasi pendidikan politik di Indonesia yang menjadi titik balik bagi kematangan politik kelompok remaja sebagai pemilih pemula. Secara implisit, kondisi ini kerap dikenal dengan defisit partisipasi kritis (Pakpahan dkk., 2024b). yaitu nilai partisipasi semata dinilai dari basis kuantitatif yang tinggi (signifikan). Namun dalam praktiknya, secara substansial belum memenuhi kualitas partisipasi deliberatif yang dibekali pertimbangan kemapanan literasi politiknya.

Pada kancah internasional, praktik batas usia pemilih dalam politik elektoral seperti di Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Italia, Brasil, Nigeria, India, Jepang, dan Malaysia itu berusia 18 tahun. Sedangkan di Korea Selatan itu usia pemilih minimal 19 tahun, bahkan di Singapura harus berusia 21 tahun. Meskipun demikian, terdapat negara-negara yang memang mengatur usia di bawah 18 tahun (yaitu 17 dan 16 tahun) sudah diberikan hak pilih seperti di Austria, Malta, dan Inggris. Gagasan di negara-negara yang memberikan hak pilih di usia 16 maupun 17 tahun disebabkan karena rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara sebagai pemilih dewasa di negara tersebut, khususnya dalam pemilu (Franklin, 2004). Artinya, pemilih pemula berusia 16-17 tahun hanya dijadikan sebagai objek penderita yang menanggung beban negara untuk peningkatan kuantitatif semata dalam kontestasi politik elektoral.

Dinamika perilaku pemilih siswa SMA menunjukkan fakta yang unik di negara ini. Cara mereka menentukan pilihannya kepada kontestan (baik itu kandidat maupun partai) cenderung berlandaskan pada FOMO. Artinya faktor sosiologis menjadi salah satu pijakan menentukan pilihan pada pemilu. Faktor lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan ikatan pertemanan tetap menjadi salah satu faktor penentu atas keputusan pemilih siswa.

Selanjutnya bila mencermati hasil wawancara salah seorang informan yang mengatakan bahwa “... *money politics* tuh udah hal yang **lumrah** lah. Jadi ada dorongan juga dari pasangan calon, makanya **mau memilih**.” Dia mengaku adanya praktik politik uang yang dianggap “lumrah” dan menjadi dasar atas pengambilan keputusan memilih. Hal ini menampilkan fakta bahwa alasan rasionalitas atau *rational choice* (untung rugi) menjadi kalkulasi atas keputusan memilih kandidat atau partai politik. Hal yang sangat disayangkan adalah praktik jual beli suara dianggap hal yang lumrah oleh pemilih SMA sederajat. Fakta

ini sangat riskan dan berdampak pada masalah hukum pidana dan kecurangan pemilu. Maka, rendahnya literasi politik dan hukum pemilih SMA menyebabkan terjadinya normalisasi politik uang.

Atas dasar itu, literasi politik bagi para pemilih siswa SMA sederajat melalui hadirnya ekstrakurikuler kewarganegaraan di sekolah (maupun di luar sekolah) menjadi urgensi yang tak bisa dihindari. Aktivitas tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman literasi politik pemilih SMA yang memadai, konstruktif dan kritis. Sehingga kerangka pendidikan seperti ini mampu dijadikan *entry point* utama dalam meredam dekadensi praktik buruk dalam politik elektoral. Di Jerman, kurikulum pendidikan politik (*Unterrichtsprinzip*) sudah diberikan oleh pemerintah sejak usia 12–13 tahun. Hal ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, serta kapasitas partisipatif siswa (Krammer, 2008; Mycock et al., 2020).

Studi para sarjana Jerman tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemberian hak memilih kepada pemilih siswa perlu diiringi dengan pendidikan politik kritis yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal dan kegiatan pendukung lainnya. Maka demikian, esensi utama di Indonesia bukan hanya persoalan kesiapan siswa dalam pemilu. Akan tetapi, absennya *supporting system* (Indrawan & Yuliandri, 2023) dijadikan sebatas penyampai informasi, bukan dirangkai sebagai arena pembentukan *critical citizens* (Dalton, 1979) menambahkan permasalahan nyata di lapangan bagi kematangan para pemilih siswa di Indonesia. Secara implisit, hal inilah yang menjadi pijakan awal mayoritas siswa tetap bergantung pada media sosial yang justru menjerumuskan serta rawan hoaks (Alodat dkk., 2023).

Hal demikian itu memperlihatkan bahwa pemilih pemula usia 17 tahun membuktikan adanya pola kebingungan teknis, minimnya literasi politik substantif, dan cenderung mempercayakan dunia pilihan dengan sumber informasi berupa media sosial tanpa adanya verifikasi mendalam. Hal tersebut selaras dengan studi yang berkenaan dengan perilaku Gen Z dan studi tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik pemula (Alodat dkk., 2023; Pangalila & Fatimah, 2023; Yahya et al., 2024). Pada akhirnya pemilih pemula dengan batas usia minimum 18 tahun atau sedang proses berkuliah di level universitas dijadikan pilihan yang tepat sebagai bentuk *self-assessment* atas keterbatasan pemilih siswa. Maka demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan keterbatasan usia pemilih pemula di Indonesia, melainkan mempertegas problem utama yang berakar dari rendahnya kualitas institusi pendidikan politik, baik di ruang digital, lingkungan keluarga maupun sekolah (Eichhorn & Huebner, 2022).

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan benang merah bahwa batas minimum usia pemilih pemula di Indonesia yakni 17 tahun pada umumnya belum memiliki kesiapan paripurna untuk menggunakan hak pilih. Hal ditegaskan diperoleh secara fenomenologis yang meminta konfirmasi kepada para informan pemilih siswa sederajat. Mereka sebagai pemilih pemula menilai dengan usia mereka yang masih 17 tahun menganggap belum matang untuk memilih karena keterbatasan pemahaman teknis dan substantif, serta lebih merasa siap pada usia 18–20 tahun. Rekonstruksi dan proyeksi atas temuan ini adalah perlunya peninjauan kembali kebijakan usia pemilih dari 17 tahun menjadi 18 tahun atau sedang berkuliah. Hal ini didasarkan pada kesiapan partisipasi tidak hanya sekedar ditentukan oleh umur, melainkan oleh ekosistem pendidikan politik yang menyertainya. Esensi lain dalam penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendidikan politik yang tidak hanya sekedar hadir secara prosedural. Akan tetapi pendidikan politik perlu dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah kepada para pemilih siswa secara substansial dan berkelanjutan. Maka demikian, batas usia minimum 18 tahun untuk pemilih pemula di Indonesia dinilai lebih tepat.

Adapun limitasi kajian ini ialah minimnya jumlah informan dan jumlah sekolah yang diwawancarai serta lingkupnya hanya terbatas di Kota Serang. Meskipun secara metodologi dan pendekatan fenomenologi sudah memenuhi persyaratannya. Namun upaya yang lebih serius perlu dikerjakan oleh peneliti selanjutnya. Misal menggunakan pendekatan studi kasus yang akan membedah secara holistik kasus perilaku pemilih SMA sederajat dengan lokus yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alodat, A. M., Al-Qora'n, L. F., & Abu Hamoud, M. (2023). Social Media Platforms and Political Participation: A Study of Jordanian Youth Engagement. *Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/socsci12070402>
- Bartels, L. M. (2012). The Study of Electoral Behavior dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Dalton, R. J. (1979). The Participation. *Journal of European Industrial Training*, 3(1), 20–24. <https://doi.org/10.1108/eb014178>
- Eichhorn, J., & Huebner, C. (2022). Evidence from Germany: Does reducing the voting age to 16 lead to higher turnout at elections? . *Blog.Lse.Ac.Uk*, 16–19
- Eriza, A. J., Adnan, M. F., Negara, A., & Padang, U. N. (2025). Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. 9(1976), 25797–25804
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809–1815. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>
- Franklin, M. N. (2004). Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945. *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945*, 1–293. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511616884>
- Harrison, R. L., Reilly, T. M., & Creswell, J. W. (2020). Methodological Rigor in Mixed Methods: An Application in Management Studies. *Journal of Mixed Methods Research*, 14(4), 473–495. <https://doi.org/10.1177/1558689819900585>
- Hooghe, M., & Stiers, D. (2017). Do reluctant voters vote less accurately? The effect of compulsory voting on party–voter congruence in Australia and Belgium. *Australian Journal of Political Science*, 52(1), 75–94. <https://doi.org/10.1080/10361146.2016.1260685>
- Huebner, C., & Eichhorn, J. (2022). the Tide Raising All Boats? Social Class Differences in Political Participation Among Young People in Scotland. *Scottish Affairs*, 31(2), 165–189. <https://doi.org/10.3366/scot.2022.0407>
- Ilmar, A., Hariyanti, Y., & Purwandari, J. D. (2025). Pendidikan Politik yang Relevan untuk Generasi Z : Eksplorasi. 6, 68–82
- Indrawan, J., & Yuliandri, P. (2023). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 4(1), 184–196. <https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v4i1.29172>
- Krammer, R. (2008). Die durch politische Bildung zu erwerbenden Kompetenzen
- Lang, A. (2023). Voting at 16? 16–17-Year-Old Germans Vote as Correctly as Adults. *Political Psychology*, 44(4), 857–870. <https://doi.org/10.1111/pops.12892>
- Lara Angraini, Irzal Anderson, & Sundari Utami. (2025). Literasi Politik Kaum Muda: Tingkat Pengetahuan Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Muaro Jambi Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7618>
- Lundberg, E., & Abdelzadeh, A. (2025). The role of youth extracurricular activities and political intentions in later political participation and civic engagement. *Journal of Adolescence*, 97(3), 662–674. <https://doi.org/10.1002/jad.12443>
- Pangalila, T., & Fatimah, S. (2023). The influence of civic education learning and the Pancasila Student Profile Program on improving Ideological values understanding. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 359–369. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.61511>
- Pakpahan, A. F., Mulyadi Nugraha, D., Faizah, H. El, Maheswari, L. L., Rasyid, M. N., Azahra, S. Z., & Rismawati, Y. (2024). Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta

- Demokrasi 2024. Jurnal Pendidikan Berkarakter, 2(1), 2988–0661. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.587>
- Putri, P., & Sari, M. M. K. (2020). Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Sidoarjo. Jcms, 5(2), 1–15. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jcms/article/view/17502>
- Putro Herwanto, D., & Febrianti, D. (2025). Generasi Z di Era Politik Digital: Bagaimana Media Sosial Membentuk Kecemasan Dan Antusiasme dalam Pilkada Bogor 2024. Jurnal Bisnis & Komunikasi, 12(1).
- Roth, D. (2008). Kajian Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen, dan Kaedah, terjemahan. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung fur die Freiheit
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>
- Solihin, M., Pamungkas, T. S., & Purba, J. R. T. (2017). Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu Presiden Tahun 2014. Jurnal Trias Politika, 1(1), 155–170. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.721>
- Tamma, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. Jurnal Politik Profetik, 9(1), 43. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a3>
- Wagner, M., Johann, D., & Kritzinger, S. (2012). Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice. *Electoral Studies*, 31(2), 372–383. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.007>
- Zeglovits, E., & Aichholzer, J. (2014). Are People More Inclined to Vote at 16 than at 18? Evidence for the First-Time Voting Boost Among 16- to 25-Year-Olds in Austria. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 24(3), 351–361. <https://doi.org/10.1080/17457289.2013.872652>